

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Koenigsmann.

1. Hukum waris Islam tidak membedakan ujud harta warisan, artinya celurah harta menjadi kesatuan yang harus dibagi, misalnya dalam harta waris terdapat tanah, maka harta tanah itu dalam perhitungan wajib dibagi sebagai bagian dari keseluruhan harta peninggalan. Tetapi boleh juga tidak dibagi bila terdapat kesepakatan serta dalam perhitungan dapat menemui bagian seseorang ahli waris.
 2. Pelaksanaan waris tanah di desa Martajasah secara administratif melanggar undang-undang dan hukum syaria'. Begitu pula dalam pembagian warisnya, ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam.
 3. Pelanggaran terhadap undang-undang dan hukum syaria' serta adanya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pembagian waris tanah di desa Martajasah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap agama dan hukum, serta pengaruh keadaan ekonomi yang kurang memadai.

B. Saxan-saxan.

Alternatif untuk menetralkisir kasus pelanggaran terhadap undang-undang dan hukum syara' dalam hal pelakunya varis tanah di desa Martajasah sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum, kegiatan ini dinasudahkan agar pihak kantor Agraria setempat memberi penyuluhan terhadap masyarakat Martajasah tentang isi pasal - pasal yang ada dalam undang-undang pokok agraria (UUPA), dengan tujuan agar masyarakat mengerti terhadap ke-

wajiban-kewajibannya sebagai pemilik tanah bekas hukum adat.

2. Pengaruh hak, kegiatan ini sebagai realisasi dari pasal 19 ayat (1) UUPA.
 3. Memasyarakatkan hukum waris Islam, kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi sadar untuk mereview dan meleksikonakan hukum waris Islam sebagai konsekuensi dari orang Islam terhadap hukum agamanya.

-50-